

**KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang)**

Riang Agustin S¹, Dr. Dwi Cahyono, M.Si, Ak², Gardina Aulin N, S.E, M. Akun³
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and internal control on the value of financial reporting information in the Lumajang regency government. The approach used in this research is quantitative.

Respondents in this study were heads of finance, accounting staf and related parties in financial reporting to the OPD government of Lumajang district. Of the 66 questionnaires distributed, 64 respondents were included in the data processing. Data analysis used SPSS version 21. The statistical method used to test multiple linear hypotheses. The results of this study indicate that the capacity of human resources, the use of information teknologi does not significantly influence the value of financial reporting information of the local goverment while internalcontrol has a significant effect on the value of financial reporting information of the Lumajang district government.

Keywords : value of government financial reporting information, human resource capacity, utilization of information technology and internal control.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Responden dalam penelitian ini kepala bagian keuangan, staf akuntansi dan pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan pada OPD pemerintah kabupaten Lumajang. Dari 66 kuisioner yang dibagikan diperoleh 64 responden yang dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data menggunakan program SPSS versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis linier berganda. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lumajang.

Kata kunci : Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Organisasi sektor publik diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha dalam mayoritas kepemilikannya di tangan pemerintah bertanggung jawab melakukan dalam pelayanan publik, memenuhi kesejahteraan dibidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, keamanan perekonomian dari kebebasan dalam beragam hal lainnya. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari ilmu ekonomi, sektor publik juga sebagai suatu entitas dalam aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin mengalami kemajuan menimbulkan tuntutan lebih besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2006). Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah bentuk laporan pertanggungjawabannya atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah telah diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Apabila laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, nantinya berdampak pada kerugian daerah, kelemahan administrasi, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya. Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Yuliani, Nardirsyah dan Bakar 2010)

Fenomena yang terjadi terkait dengan laporan keuangan pemerintah Lumajang mendapat perhatian khusus atas prestasinya yang buruk dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti Tahun 2017 lalu.

Harapannya, di Tahun 2018 mendapatkan WTP. Dilapori oleh BPK RI bahwa Kota Lumajang bahwa atas opini auditnya WDP. Kabupaten Lumajang turun kelas yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Gagal menerima opini WTP, lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. LKPD itu sudah diatur dengan standart akuntansi pemerintah. Kalau penyajiannya memenuhi stnadar, tentu mendapatkan opini tertinggi yaitu WTP. Ada 7 bab yang dikerjakan, mulai dari realisasi anggaran, sisa anggaran lebih, laporan operasioanal, kas, neraca, dan laporan mutasi. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Oleh karena itu peran sistem pengendalian merupakan hal penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran sistem pengendalian internal yaitu pemberian keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan dengan memperoleh opini WTP dari BPK yang menjadi alat pengambilan keputusan dan melakukan pendeteksian dan penyelidikan mengenai penggelapan atau penipuan (*fraud*). Selain itu dalam pemerintah kabupaten Lumajang akan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki untuk mendongkrak pendapatan daerah. Sebab, Lumajang memiliki tempat wisata yang indah. (www.petisi.co diakses pada hari Kamis tanggal 11 April jam 13.00 wib).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatasterdapat bahwa Kabupaten Lumajang turun kelas yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Gagal menerima opini WTP, lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. Maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan dengan terjadinya WDP agar menjadi WTP ?

c. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

e. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis
Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya
2. Bagi penulis
Agar mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Pelaporan Keuangan Daerah

2. Tinjauan Teori

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). Sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan yaitu suatu yang universal dalam kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman dilihat dari lamanya seorang bekerja, dengan pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Warisno (2008) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang, pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidakpastian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan suatu sistem informasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mempermudah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi (Jogiyanto 1995:18). Menurut Winidyaningrum (2010) pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem

manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Sistem akuntansi pemerintah perlu untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Pengendalian Intern

Pengendalian Intern Pemerintah diatur oleh peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 1 dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
5. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada menteri/pimpinan lembaga.
6. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur
7. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
8. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
9. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undang lainnya.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
11. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

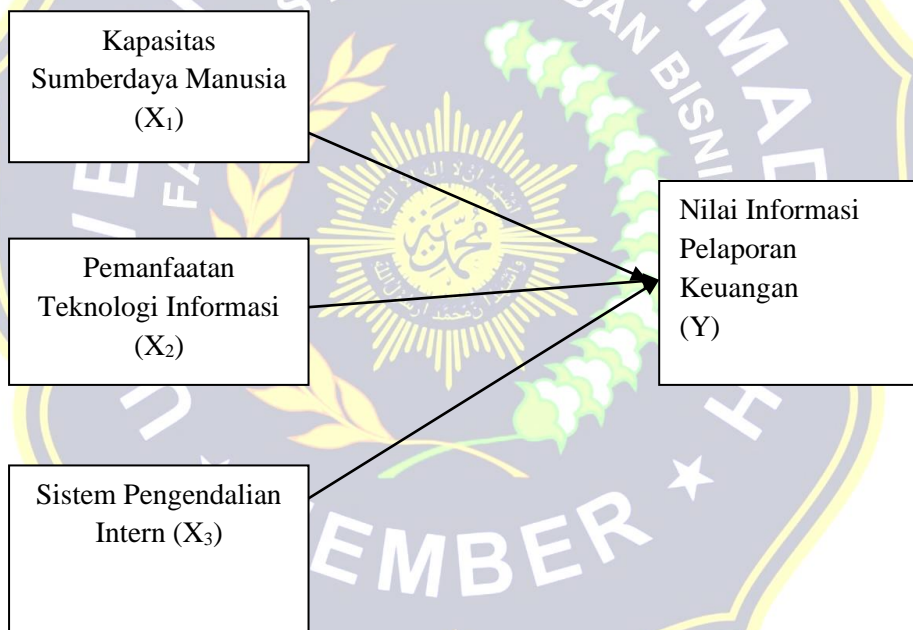
Menurut suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami, maka informasi yang bermanfaat adalah informasi yang mempunyai nilai dan informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Nordawan,2008). Adapun karakteristik kualitatif sebagai berikut:

1. Relevan adalah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.informasi yang relean memiliki beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*).
Informasi yang disajikan secara tepat waktu dan dapat berpengaruh berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Karakteristik dari informasi yang andal yaitu :
 - a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan dapat dipahami oleh pengguna.

Kerangka Pemikiran

Menurut Suwardjono (2006) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Menurut Suwardjono (2006) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan daerah.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu jenis data subjek. Data subjek adalah jenis data yang penelitiannya berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang menjadi subjek penelitian atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2007). Dalam penelitian ini berbentuk tanggapan responden yang diberikan secara tertulis. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk kuisioner. Sumber datanya termasuk dalam data primer. Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2007). Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuisioner oleh responden, yaitu kepala dan staf bagian keuangan atau administrasi.

Analisis Data

Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2011), reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011).

Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variancedari* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut juga dengan *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, tidak *heteroskedastisitas*.

Multikolinieritas

Uji yang dimaksudkan mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen

Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda (*linear regression analysis*). Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Nilai informasi pelaporan keuangan

A : Konstanta

B₁₋₃ : Koefisien Regresi

X₁ : Kapasitas sumberdaya manusia

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi / R² digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel. Nilai R² terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika R² semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya (Ghozali, 2011).

Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

1. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitasnya signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Responden

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 66 Kuisoner yang diantar langsung ke 22 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dengan responden 66. Pengiriman kuisoner dilakukan pada tanggal 15 juli 2019. Setelah 2 minggu kuisoner yang kembali sebanyak 64 lembar kuisoner.

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuisoner. Tabel berikut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*).

Tabel 4.1
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisoner

Keterangan	Jumlah
Kuisoner yang dikirim	66 Kuisoner
Kuisoner yang kembali	64 Kuisoner
Kuisoner yang dapat digunakan	64 Kuisoner
Kuisoner yang tidak kembali (66-64)	2 Kuisoner

Sumber : data olahan (2019)

Pengiriman kuisoner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 2 minggu setelah pembagian kuisoner. Kuisoner yang kembali sebanyak 64 dimana semuanya data dapat digunakan.

Jenis Kelamin Responden

Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	30	47%
2	Wanita	34	53%
	Total	64	100%

Sumber : data oalahan (2019)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin wanita sebesar 53%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lumajang adalah berjenis kelamin wanita.

Umur Responden

Data responden berdasarkan usia responden dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3
Gambaran Usia Responden

Umur	Frekuensi	Persentase
20-30	25	39%
30-40	22	34%
40-50	17	27%
Total	64	100%

Sumber : data olahan (2019)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar usia responden 20-30 tahun. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 39%

Latar Belakang Pendidikan

Data responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4
Gambaran latar belakang pendidikan responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	17	27%
Diploma	24	37%
S1	20	31%
S2	3	5%
Total	64	100%

Sumber : data olahan (2019)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan Diploma. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 37%.

Lama Bekerja di Organisasi Perangkat Daerah

Data responden berdasarkan lama bekerja pada satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5
Gambaran Lama Bekerja

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase
< 1 Tahun	12	19%
1-5 Tahun	31	48%
>5 Tahun	21	33%
Total	64	100%

Sumber : data olahan (2019)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden sebagian besar dalam bekerja diorganisasi perangkat daerah yaitu 1 sampai 5 tahun. Hal ini diketahui dari persentase sebesar 48%.

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan bertujuan unuk dapat mengetahui apakah item dalam kuisoner layak disebarkan, dengan kata lain valid atau tidak layak disebarkan kepada responden dengan kata lain tidak valid. Untuk mengukur validitas pada data digunakan alat berupa software SPSS. Item kuesioner dikatakan valid apabila hasil kuesioner lebih kecil dari 0,05 (5%). Berikut tabel pengujiannya, yaitu :

Tabel 4.6
Hasil dari uji validitas

Variabel	Pertanyaan	Sig	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
	X1.7	0,000	Valid
	X1.8	0,000	Valid
	X1.9	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
	X2.5	0,000	Valid
	X2.6	0,000	Valid
	X2.7	0,000	Valid
	X2.8	0,000	Valid
Pengendalian Intern	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
	X3.7	0,000	Valid
	X3.8	0,000	Valid
	X3.9	0,000	Valid

Lampiran 1

Pada tabel 4.6 hasil uji validitas kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan daerah. Dari tabel tersebut telah menyatakan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid karena variabel menunjukkan hasil validitas kurang dari 0,005.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang dapat dikatakan handal atau reable. Uji reliabilitas dalam penelitian digunakan untuk menilai apakah pertanyaan yang telah diajukan dalam kuesioner telah konsisten dari waktu ke waktu atau tidak. Uji reabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ maka data dikatakan reliabel (Ghozali, 2016). Hasil pengujian realibitas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)	Keterangan
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)	0,926	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,934	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,929	Reliabel
Pengendalian Intern (X3)	0,928	Reliabel

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* (α) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui normalitas dari distribusi data dilakukan dengan uji *one sample kolmogorov sminov test*. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013). Data terdistribusi secara normal jika nilai *asym sig (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05. Hasil pengujian normalitas data dengan uji *one sample kolmogorov smirnov test* adalah sebagai berikut

Tabel 4.8
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Kolmogorov-smirnov Z	1,085	1,085
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,190	0,190

Sumber : Lampiran 3

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,190. Nilai tersebut telah memenuhi syarat normalitas yang lebih besar dari 0,05. Maka data ini menunjukkan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

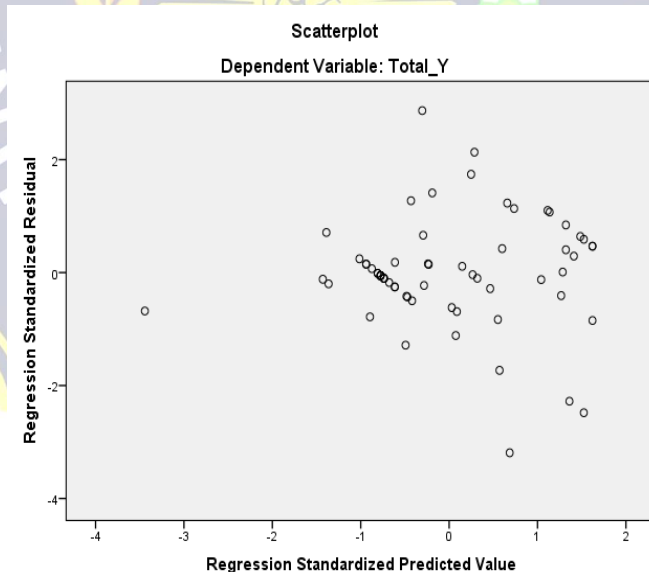
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan toleransi > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas

Nama Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,929	1,077	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,936	1,069	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pengendalian Intern (X3)	0,903	1,107	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 3

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Lampiran 4

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sarwono ; 2006 “ analisis regresi linear berganda yaitu menganalisis sesuatu yang bertujuan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel terkait dengan menggunakan skala pengukuran yang memiliki sifat metrik, baik untuk variabel bebas atau variabel terikatnya”.

Tabel 4.11
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,872	3,473		1,403	0,166
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,093	0,048	0,158	1,197	0,060
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,057	0,075	0,063	0,760	0,450
Pengendalian Intern	0,613	0,072	0,715	8,542	0,000

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut ;

$$Y_1 = 4,872 + 0,093 X_1 + 0,057 X_2 + 0,613 X_3 + e$$

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Ghozali (2012; 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Uji hipotesisi ini digunakan untuk membuktikan hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan dengan membandingkan nilai signifikan t dan derajat kepercayaan sebesar 5%. Masing-masing variabel independen dikatakan berpengaruh jika nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Variabel	Beta	T	Sig	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,158	1,917	0,060	Berpengaruh Tidak Sighifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,063	0,760	0,450	Berpengaruh Tidak Signifikan
Pengendalian Intern	0,715	8,542	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber : Lampiran 6

Pembahasan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pelaporan keuangan daerah. Hasil yang didapatkan dari menggunakan metode analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan hasil t hitung 0,060. Nilai t hitung lebih dari 0,05 sehingga H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini bahwa ketidaksignifikan disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di sub bagian akutansi tata usaha keuangan yang belum mendukung. Meskipun pemerintah kabupaten Lumajang telah memperbentukan lebih kurang tujuh puluh tenaga akuntansi yang tersebar di satuan kerja perangkat daerah, namun belum optimal. Karena dengan banyaknya volume transaksi keuangan pemerintah kabupaten Lumajang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Temuan empiris dari penelitian ini menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar belakang pendidikan akutansi, belum jelasnya *job description*, walaupun sistem akutansi yang dibangun sudah baik tetapi sumberdaya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan hasil t hitung 0,450. Nilai t hitung lebih dari 0,05 sehingga H_2 ditolak.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanuti terselenggarannya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Isthika, Pratiwi (2016) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Walaupun komputer yang dimiliki sudah cukup banyak dan tersambung dengan jaringan internet, akan tetapi untuk proses pengiriman informasi dan komunikasi para pegawai belum bisa memanfaatkan fasilitas secara maksimal. Pemerintah di Kabupaten Lumajang masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga dalam institusinya masih banyak juga para pegawai dan karyawan yang tidak memaksimalkan kenudahan teknologi informasi ini.

Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengendalian intern terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pengendalian intern dengan hasil t hitung 0,000. Nilai uji t hitung kurang dari 0,05 sehingga H3 telah diterima.

Hasil dari yang penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada pemerintah Kabupaten Lumajang sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan dengan teliti dalam memerhatikan kebocoran atas laporan keuangan. OPD di Kabupaten Lumajang sudah menggunakan sistematika yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif dengan melihat sisi resiko dari faktor eksternal dan internal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Rahmadani (2015) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut menyatakan semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut ;

1. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dan mendapat hasil yang lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memilih kuesioner yang dapat dipahami oleh responden, dan saat pembagian kuesioner harap dijelaskan terlebih agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode survey dengan mendatangi langsung atau melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan misalnya variabel penerapan standar akuntansi.

Daftar Pustaka

- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Usman Bakar. (2010). "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Intern Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol.3 No.2 206-220.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-7.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.

Nordiawan, Dedi. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Winidyaningrum. 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN). Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Jugiyanto, HM. 1995. Analisis dan Desain System Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi Offies. Yogyakarta

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dngan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang ; Badan Penerbit Universitas di Ponegoro.

<https://ppid.lumajangkab.go.id>

www.petisi.co

<http://petisi.co/gagal-raih-opini-wtp-2017-pemprov-pelototi-lumajang-dan-sampang>

<https://lumajangkab.go.id/profil/sejarah.php>

